

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

4.1. Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kini diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat merencanakan, melaksanakan, pada pengambilan keputusan mengenai rencana strategi kebijakan, program pembangunan daerahnya, dan perlu memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, mampu membantu menyelesaikan permasalahan nasional serta

mengemban amanat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 17 dan 18 memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tingkat Kabupaten, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/Kabupaten dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Visi Kabupaten Pringsewu adalah "*Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis Berbasis Ekonomi Kerakyatan*"

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pringsewu tersebut di atas, dilakukan dengan Misi yang akan dilaksanakan yakni "Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah, Meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah '*Good Governance and Clean Government*' serta

Membangun masyarakat religius, berbudaya, tenteram dan harmonis.”

Kondisi *good governance and clean government* memerlukan sinergitas kelembagaan (perangkat daerah) guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala Daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan daerah demi keberhasilan Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta demokrasi dalam mendukung upaya pencapaian visi misi Kabupaten Pringsewu.

4.2. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu terletak 37 kilometer sebelah barat Bandar Lampung, ibukota provinsi. Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak pada 104°45'25" - 105°8'42" Bujur Timur (BT) dan 5°8'10"- 5°34'27" Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 625,1 km² atau 62.510 Ha.

Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten. Adapun batas administratif dari Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah.

- Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pugung dan Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Kabupaten pringsewu memiliki 19 sungai yang mengalir wilayah-wlayah pesawahan yang ada di kabupaten dengan luas yang beragam, daerah aliran sungai yang paling luas yaitu way sekampung dengan luas sekitar 288 Ha sedangkan daerah aliran sungai way langsep hanya sekitar 5 Ha, untuk lebih jelasnya mengenai DAS di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada tabel 2.,

Tabel 2
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten/Kota
Kabupaten Pringsewu

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M3/dtk)	
			Max.	Min.
1	Way Sekampung	288	1050	225
2	Way Tebu / Bulok	167.2	750	25
3	Way Semah	22.4	56	0.50
4	Way Wayah	16	46	1.00
5	Way Langsep	5	30	1.00
6	Way Mangan	168	25	0.50
7	Way Padang Ratu	15	40	1.50
8	Way Mincang	48	38	1.00
9	Way Rukem	19.2	30	1.00
10	Way Gading	40	15	0.50
11	Way Nenep	32	10	0.50
12	Way Wonokriyo	36	10	0.50
13	Way Apus	25	8	0.50
14	Way Bulu Rejo	4.8	15	1.00
15	Way Bayas	12	7	0.50
16	Way Karang Sari	20	5	0.50
17	Way Lipang	42	20	1.00
18	Way Manak	40	20	0.50
19	Way Napal	25	15	1.00

Sumber : Dinas PU Kabupaten Pringsewu

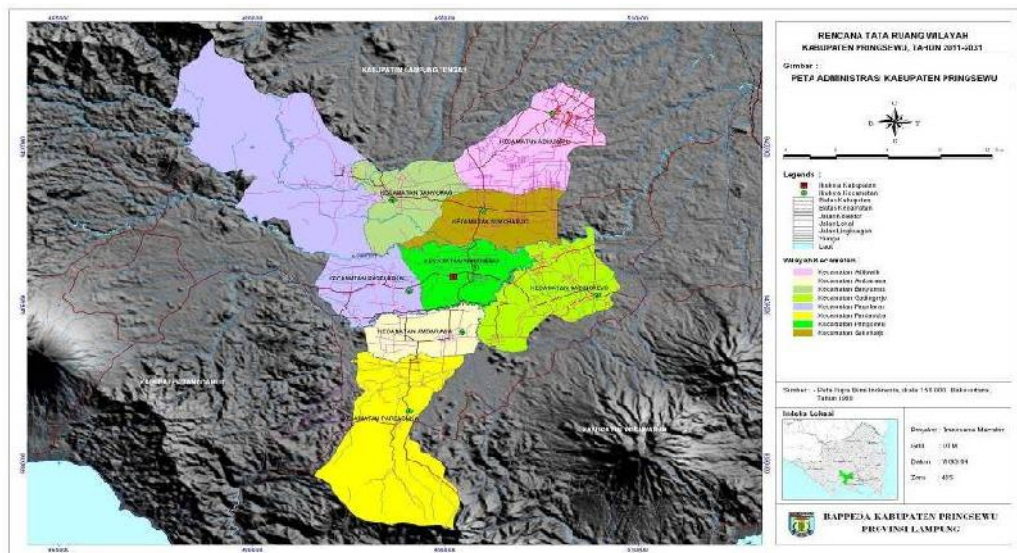
Secara administrasi Kabupaten Pringsewu dibagi kedalam 9 kecamatan dan memiliki 101 desa/kelurahan dengan luas 62.510 Ha. Untuk lebih jelas mengenai pembagian administrasi dapat dilihat pada tabel 3. Sedangkan untuk melihat lebih jelas mengenai batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dlam tabel 3 dan pada gambar 1.

Tabel 3
Nama dan Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			(Ha)	(%) Thdp Total
1.	Sukoharjo	16	7.295	11,67
2.	Ambarawa	8	3.099	4,96
3.	Pagelaran	24	9.474	15,16
4.	Adiluwih	13	7.482	11,97
5.	Pringsewu	15	5.329	8,53
6.	Banyumas	11	3.985	6,37
7.	Pardasuka	13	9.474	15,16
8.	Gadingrejo	23	8.571	13,71
9.	Pagelaran Utara	10	7.801	12,47
Jumlah		133	62.510	100

Sumber : Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Pringsewu, Tahun 2014

Gambar 1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pringsewu



Sumber: POKJA AMPL Bapeda Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tahun 2012

4.3. Demografi

Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari masyarakat yang beradat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat Saibatin (Peminggir). Mata pencaharian yang utama di Pringsewu adalah bertani dan berdagang.

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010, kecamatan yang mempunyai angka kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2010 adalah Kecamatan Pringsewu sebesar 1.427 jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Pardasuka sebesar 340 jiwa/km². Lebih jelasnya mengenai kepadatan penduduk pada setiap kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 4** dan Gambar 2.

Tabel 4
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Pringsewu Tahun 2014

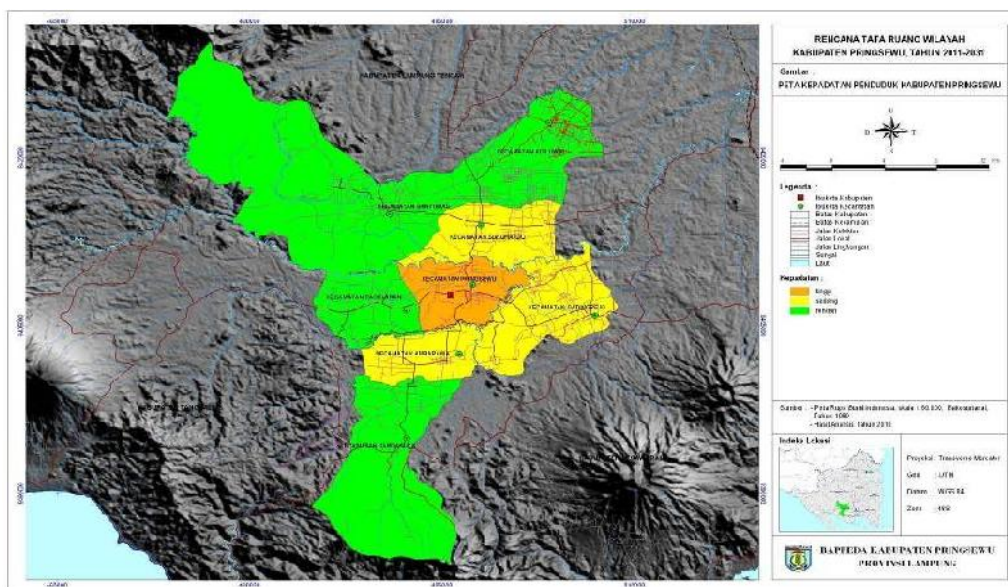
No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk 2014 (Jiwa/Km ²)	Klasifikasi
1.	Sukoharjo	73	51.519	13.053	142	Sedang
2.	Ambarawa	31	35.795	91.60	87	Rendah
3.	Pagelaran	95	52.706	13.488	180	Sedang
4.	Adiluwih	75	33.731	8.801	222	Sedang
5.	Pringsewu	53	82.677	21.357	64	Rendah
6.	Banyumas	40	22.195	5.758	180	Sedang
7.	Pardasuka	95	39.426	9.510	241	Sedang
8.	Gadingrejo	86	73.838	18.721	116	Rendah
9.	Pagelaran Utara	78	17.482	4.046	466	Tinggi
Kabupaten Pringsewu		626	409.369	103.885	1698	

Sumber : Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Pringsewu, Tahun 2014

Keterangan : Tinggi : > 466 jiwa/km²
 Sedang : 241– 142 jiwa/km²
 Rendah : < 116 jiwa/km²

Berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu adalah 409.369 jiwa, dengan persebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Pringsewu sebesar 20,84%. dengan tingkat pertumbuhan - 0,42%, Sedangkan persebaran penduduk terkecil berada di Kecamatan Banyumas sebesar 5,21%, dengan tingkat pertumbuhan 2,6 %. Lebih jelasnya mengenai distribusi persebaran penduduk dan perkembangannya dari tahun 2006– 2010, dapat dilihat pada **Tabel 5**.

Gambar 2
Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Pringsewu



Sumber: POKJA AMPL Bapeda Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung tahun 2012

Untuk proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pringsewu pada tahun 2031 maka diperkirakan jumlah penduduk akan meningkat hingga mencapai 534.157 jiwa. Lebih jelasnya mengenai hasil proyeksi penduduk hingga 20 tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5**

Tabel 5
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu
Tahun 2013 –2031

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2013 (jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Distribusi Penduduk Tahun 2014 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2014-2031 (%)
			2014	2015	2021	2026	2031		
1.	Pardasuka	34.825	39.426	40.439	45.636	51.500	58.118	8,85	2,57
2.	Ambarawa	38.239	35.795	37.893	48.995	63.351	81.912	8,84	5,86
3.	Pagelaran	60.339	52.706	53.133	55.285	57.524	59.854	16,15	0,81
4.	Pringsewu	76.773	82.677	82.330	80.601	78.908	77.251	20,84	-0,42
5.	Gadingrejo	71.020	73.838	74.613	78.530	82.653	86.993	18,87	1,05
6.	Sukoharjo	47.430	51.519	52.544	57.772	63.521	69.841	12,26	1,99
7.	Banyumas	20.373	22.195	22.719	25.400	28.397	31.748	5,21	2,36
8.	Adiluwih	33.435	33.731	33.930	34.931	35.961	37.022	9,00	0,59
9.	Pagelaran Utara	15145	17.432	17.615	18.540	19.513	20.538	100	1,35
Kabupaten Pringsewu		364.825	409.319	415.216	445.690	481.328	523.277	100	1,35

Sumber : RTRW Kabupaten Pringsewu 2013-2031

Dari tingkat kesejahteraan penduduk, data jumlah Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Pringsewu Lampung dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 6
Jumlah Keluarga Pra KS dan KS Kabupaten Pringsewu
Menurut Kecamatan Tahun 2014

No.	Kecamatan	Tahun 2009 (Keluarga)									
		Pra Sejahtera (Pra KS)		Sejahtera (KS)							
				I		II		III		III +	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Pardasuka	3.807	12,43	2.912	10,26	1.944	5,96	556	2,81	177	7,05
2.	Ambarawa	2.412	7,83	2.719	12,86	2.726	4,71	1.184	8,87	119	5,32
3.	Pagelaran	3.865	19,84	3.245	14,30	4.893	15,99	1.344	11,87	142	7,13
4.	Pringsewu	5.228	15,53	4.755	19,05	5.598	26,13	4.506	24,57	1270	31,25
5.	Gadingrejo	5.797	20,62	3.966	16,23	3.319	16,35	3.796	23,27	560	20,28
6.	Sukoharjo	2.108	9,57	1515	13,67	6.121	13,23	2.859	15,94	450	17,85
7.	Banyumas	754	5,24	753	4,50	3.349	5,01	851	7,13	51	1,41
8.	Adiluwih	2.672	8,95	2.095	9,14	2.974	12,62	912	5,55	148	9,71
9.	Pagelaran Utara	1934	4,80	937	2,31	951	2,35	210	5,19	14	3,46
Kabupaten Pringsewu		28.577	100	22.897	100	33.148	100	16.218	100	2931	100

Sumber : Rekapitulasi hasil Pendataan Keluarga Kabupaten Pringsewu 2014

Kecamatan Pringsewu adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lainnya walaupun memiliki pertumbuhan yang relatif kecil, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah, kepadatan dan proyeksi penduduk di tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 7.

4.4. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pringsewu

Melalui Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang mengamanatkan bahwa kewenangan dan urusan BKKBN tidak hanya terbatas pada masalah yang berhubungan dengan pembangunan keluarga berencana Nasional dan keluarga sejahtera namun juga menyangkut masalah yang berhubungan dengan pembangunan kependudukan.

Kepanjangan BKKBN telah berubah menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional. Dengan mengembangkan, mendata, melaksanakan, pengendalian penduduk dan menyelenggarakan program KB Nasional.

Terbentuknya BKKBN Kabupaten Pringsewu bersamaan dengan Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008.

Dalam melaksanakan tugasnya BKKBN mempunyai Fungsi perumusan kebijakan Nasional, penetapan norma, setandar, prosedur dan kiteria (NSPK), pelaksanaan atvokasi dan Koordinasi, penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan edokasi, pemantauan, dan efalwasi serta pembinaan, pembimbingan, pasilitasi pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional maka akan memperkuat penanganan masalah kependudukan.

Dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin berat dan perubahan lingkungan strategis yang berkembang, maka upaya untuk mewujudkan Pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana (KB). Perlu lebih ditingkatkan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.

Mengacu kepada RPJM 2010-2014, maka arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan dan KB adalah Revitalisasi Program KB dan Penyerasian kebijakan pembangun dengan pembangunan kependudukan dan KB.

Tahun 2014 merupakan tahun ke empat (4) pelaksanaan RPJM 2010-2014, adapun visi yang akan dicapai adalah “ Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 “ yaitu pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkuwalitas yang ditandai dengan menurunnya TFR menjadi 2,1 dan NRR = 1. Dengan misi “ mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Untuk memenuhi sasaran RPJM 2010-2014, perlu disusun Rencana Operasional Pembangunan Kependudukan dan KB Tahun 2014 yang dituangkan dalam sasaran kontrak kinerja Provinsi (KKP).

4.4.1. Kondisi Setrategis

Kondisi setrategis yang perlu dicermati bagi keberlangsungan pembangun Kependudukan dan Keluarga Berencana, memperhatikan hasil pencapaian

Program keluarga Berencana Nasional Kabupaten Pringsewu hingga ahir tahu 2013 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Kondisi Saat tahun 2013

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Pringsewu (SP 2010)	364.825 Jiwa
	a Laki-laki	187.440 Jiwa
	b Perempuan	177.385 Jiwa
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (Tahun 2000-2010)	0,55 %
3	Pencapaian peserta KB Baru (PB)	22.297 (110,68%)
4	Pencapaian peserta KB baru MKJP	2.113 (73,98)
5	Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)	1.947 (48,39)
6	Peserta KB Aktif (PA)	46.552 aks
7	Pasangan Usia Subur (PUS)	68.669 PUS
8	Kesertaan ber KB (PA/PUS)	67,79%
9	Peserta KB Aktif MKJP (PA MKJP)	11.017 (23,66%)
10	Peserta Kb Aktif Pria (MOP+Kondom)	1.777,81%)
11	PIK :	
	a Remaja Tumbuh (8), Tegak (2) dan Tegar (0)	11
	b Mahasiswa Tumbuh (1), Tegak (0) dan Tegar (0)	1
12	Keluarga Balita Anggota BKB Aktif	5.889
13	Keluarga Remaja Anggota BKR Aktif	4.414
14	Keluarga Lansia Anggota BKL Aktif	2.316
15	Anggota BLK Aktif	665
16	Kelompok UPPKS	137
17	Jumlah KPS dan KS 1 Aktif berusaha	1.313

Sumber data : Rencana Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Kabupaten pringsewu tahun2014

4.3.2 Kebijakan

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada seta kondisi lingkungan maka tahun 2014¹ dirumuskan beberapa kebijakan umum sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pengendalian penduduk yang seenergis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
2. Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku lintas sektor melalui sosialisasi kependudukan.
3. Peningkatan advokasi program kependudukan dan KB kepada Eksekutif dan Legislatif.
4. Peningkatan Sosialisasi dan KIIE melalui berbagai media dan pertemuan.
5. Peningkatan Keserataan MKJP.
6. Penajaman sasaran pelayanan KB : PUSMUPAR, KPS dan KSI, Wilayah GALCILITAS dan Wilayah Khusus.
7. Peningkatan akses kualitas dan kemitraan dalam pembinaan kesetaraan KB di 54 KKB Pemerintah dan Swasta.
8. Peningkatan komietment, strategi, pergerakan, pelayanan, pembinaan dan pelaporan KB swasta serta kondom.
9. Peningkatan komietment Stakeholder dan keluarga terhadap program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
10. Pemanfaatan pakton khususnya kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS untuk peningkatan kesertaan, pembinaan dan kemandirian ber KB bagi anggota PUS anggota pakton.
11. Peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku remaja tentang cara hidup sehat dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan generasi berencana.
12. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor LSM, LSOM, dan swasta diberbagai tingkatan.

¹ Rencana Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Kabupaten pringsewu tahun 2014

13. Pemantapan sistem pencatatan dan pelaporan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.
14. Peningkatan kecepatan dan kualitas penyediaan data, informasi dan dokumentasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

4.3.3 Strategi Operasional

Dalam upaya meningkatkan dan menetapkan pelaksanaan Program pembangunan Kependudukan dan keluarga Berencana, strategi operasional yang dilakukan pada tahun 2014 yaitu :

1. Mempertajam Segmentasi sasaran advokasi, sosialisasi, promosi dan fasilitasi kebijakan pengendalian Penduduk guna mewujudkan pembamngun berwawasan kependudukan dan KB.
2. Mengintensifkan advokasi, sosialisasi, KIE Program kependudukan dan KB Nasional.
3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pergerakan dan pelayanan KB di 54 Klinik.
4. Meningkatkan jaminan kemitraan program Pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana.
5. Mengembangkan peta wilayah sesuai dengan potensi wilayah garapan.
6. Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana, prasarana alokasi dan non alokasi.
7. Meningkatkan pelayanan KB bagi GAKIN dan RENTAN (KPS % KSI) dan daerah GALCITAS.
8. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan Prilaku Poktan (Keluarga Balita, Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Rentan) melalui pembinaan ketahanan Keluarga.
9. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan akses sumber daya terhadap Keluarga akseptor melalui usaha ekonomi produktif dan akses modal.
10. Mengembangkan melambungkan Program Penyiapan kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) melalui pendekatan “Ramah Remaja dan Mahasiswa“.

11. Pemanfaatn secara Optimal tenaga lini lapangan, petugas penghubung yang ada.

4.3.4 Indikator Kinerja dan Sasaran tahun 2014

Tabel 8
Indikator Kinerja dan Sasaran tahun 2014

No	INDIKATOR KONTRAK KERJA	SASARAN 2014	CAPAIAN
1	Jumlah Peserta KB Baru <ul style="list-style-type: none"> ➤ IUD ➤ MOW ➤ IMPLAN ➤ SUNTIK ➤ PIL ➤ MOP ➤ Kondom 	23.847 1.574 179 1.100 10.920 8.048 158 1.864	2.393 4.24 1.574 7.183 5.101 109 721
2	Jumlah Peserta KB Baru MKJP	3.015 (12,64%)	4.926
3	Jumlah peserta KB Baru Pria	2.022 (8,47%)	109
4	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tahap Tumbuh ➤ Tahap Tegak ➤ Tahap Tegar 	16 11 3 2	33
5	Keluarga yang Memiliki Balita Aktif BKB	6.583	131
6	Kelompok BKB Percontohan (2 Kelompok/ Kecamatan)	16	1
7	Keluarga Yang Memiliki Remaja Aktif BKR	4.793	131
8	Kelompok BKR Percontohan (1 Kelompok/ Kecamatan)	8	1
9	Kelompok BKL Percontohan (1 Kelompok/ Kecamatan)	8	131
10	Perkembangan kelompok UPPKS Yang Terdaftar Dalam Data Basis Online	31%	29
11	PUS Keluarga Pra KS dan KS 1 Anggota Kelompok UPPKS Pra KS dan KS 1 yang Menjadi peserta KB	97,52	13

Sumber data : Rencana Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional Kabupaten pringsewu tahun2014

4.3.5 Kegiatan Bidang Kependudukan

1. Pembentukan tim kajian kebijakan pengendalian penduduk.
2. Inventarisasi peraturan tentang kependudukan.
3. Analisis sensus penduduk tahun 2010 dengan parameter kependudukan.
4. Penyusunan analisis dan kebijakan pengendalian penduduk.
5. Sosialisasi kajian kebijakan penendalian penduduk bagi pengelola program KB tingkat Kabupaten, pengelola Program KB Kecamatan Organisasi Wanita.

4.3.6 Kegiatan Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi

1. Orentasi peningkatan wawasan bidang advokasi
2. Pelatihan teknis mupen
2. Operasional. KIE melalui mopen Kabupaten/Kota (Pemutaran Filem).
3. Advokasi kelembagaan KKB.
4. Pemantapan Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja.
5. Advokasi KIE kecamatan.
6. Pembinaan KB Lestari.
7. Pemantapan Bhakti TNI-KB-KES terpadu, Bhakti POLRI-KB-KES, Kesrak-PKK-KB-KES terpadu
8. Pemilihan IMP, PKB, terbaik tingkat Nasional/Kabupaten.
9. 10. Pembinaan melalui Harganas tingkat Nasional, Tingkat Tingkat Propensi dan Tingkat Kabupaten.
10. Pembangunan dan pemanfaatan sistem Informasi kependudukan dan keluarga (SIDUGAR) Berbasis TIK.

11. 12. Penyebar Informasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Media Elektronik dan Media Cetak.

4.3.7 Kegiatan Bidang Keluarga Berencana

1. Peningkatan Pembinaan dan kesertaan KB jalur Pemerintah, swasta dan kemandirian melalui optimalisasi petugas penghubung
2. peningkatan pelayanan KB pasca persalinan melalui Rumah Sakit Pemerintahan maupun swasta dan Puskesmas Rawat Inap melalui pembinaan dan monitoring pencatatan pelaporan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana Klinik KB Alkon dan Non Alkon oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan monitoring distribusi alkon
4. peningkatan pembinaan kesertaan KB di Daerah galticis, wilayah khusus dan sasaran khusus melalui kegiatan Bhaktis Sosial, pemanfaatan dan Camping Program
5. Sosialisasi dan KIE yang intensif tentang MOP, Kondom dan IUD melalui berbagai media pertemuan (sarasehan), media cetak dan media elektronik.
6. peningkatan jejaringan kerjasama dengan mitra kerja tentang pelayanan KB, KHIBA dan PMKR (pertemuan lintas sektor)
7. Peningkatan pembinaan kesertaan KB melalui Bhakti Sosial, pemanfaatan momentum, dan camping Program :
 - a. Perkotaan : (Kumis) Prengsewu
 - b. Wilayah (Khusus) : (Perbatasan: Adiluwih, Banyumas, Padasuka, Pagelaran)

8. Promosi program KHIBA dan PMKR (pembina ke 8 Kecamatan)
9. Menyediakan Ayoman dalam Pelayanan KB
10. Meningkatkan kepatuhan dalam pelayanan KB sesuai SOP, dilengkapi dengan pemanfaatan dan pemantapan proses informed choice dan informed consent dalam pelayanan KB
11. Peningkatan akses pelayanan KB melalui bhakti IBI (40 %), peningkatan TNI (20 %), bhakti bhayangkara (20 %) kesrak PKK – KB – kesehatan (20 %), dengan rinci :

Episode I Maret	: 25 %
Episode II Juli	: 65 % (Bhakti IBI, Bhakti TNI dan Bhakti bhayangkara)
Episode III Oktober	: 85 % (Bhakti TNI & kesrak PKK–KB– kesehatan)
Episode IV Desember	: 100 % (Kesrak PKK – KB – Kes)
12. Meningkatkan pelayanan KB intergratif (Papsmear, kondom dual protection, sosialisasi pencegahan PMS, HIV dan AIDS)
13. Pertemuan medis teknis
14. mengintensifkan pencatatan dan pelaporan penggunaan kondom melalui apotik, toko obat dan supermarket

4.3.8 Kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dan kemitraan PIK Remaja/ Mahasiswa
 - a. Meningkatkan akses melalui pembentukan PIK Remaja/ Mahasiswa di Kecamatan dan di Perguruan Tinggi melalui :

- Pengembangan COE (Center OF Exellen) di Perguruan Tinggi
 - Workshop pendidik sebaya & konselor sebaya
 - Sosialisasi program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja)
 - Advokasi PKBR kepada pemerintah Daerah
- b. Meningkatkan Tahapan PIK Remaja/ PIK Mahasiswa, Tahap Tumbuh menjadi Tahap Tegak, Tahap Tegak, menjadi Tahap Tegar melalui :
- Lomba PIK Remaja
 - Lomba Duta Mahasiswa
 - Ajang ngumpul kreatifitas PIK Remaja Tingkat Nasional
 - Tukar pengalaman PIK KRR
 - Lintas Remaja Nusantara Bahari
 - Pembinaan dan pengembangan PIK Remaja dan Mahasiswa
 - Orientasi PIK Remaja dan Mahasiswa
 - Workshop pengembangan kualitas PIK Mahasiswa
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kemitraan pembinaan program penyiapan kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) pada kabupaten atau kota. Advokasi dan KIE tentang program penyiapan kehidupan Berkeluarga bagi Remaja melalui pengembangan kegiatan promosi tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota
2. Penyusunan strategis program pembinaan ketahanan keluarga
 3. Peningkatan kemitraan dan keterpaduan dengan sector terkait dalam pembinaan ketahanan keluarga

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Bina – Bina (BKB, BK, BKL, BLK dan UPPKS)
5. Memaksimalkan pemanfaatan Data Basis dalam pembinaan dan pengembangan program
6. Pelaksanaan program PKLK melalui kelompok percontohan BLK
7. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kelompok UPPKS dalam pelatihan dan orientasi
8. Pengembangan jejaring kemitraan dalam mengakses sumber daya ekonomi
9. Pengembangan pola pendamping kelompok UPPKS dengan Perguruan Tinggi (Program KKN)
10. Pengembangan data basis kelompok UPPKS Online
11. Kegiatan momentum, antara lain Harganas, Hari Anak Nasional, Hari Lansia, dan Peringatan Hari HIV/ AIDS
12. Lomba pengelola dan kader BKB, BLK, Keluarga Harmonis Sejahtera, dan UPPKSTk. Provinsi di Kecamatan
13. Temu kader BKB, BLK, Keluarga Harmonis, dan UPPKS Tk.Provinsi
14. Orientasi pengelola program ketahanan keluarga
15. Pendampingan kelompok Bina – Bina